



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Jl. Palatehan I No. 27 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12160, Telp. 021- 27510964 Fax. 021-7220050

Siaran Pers

Lebih Dari 1.000 Hunian per Hari Didaftarkan Pengembang di SiKumbang

Jakarta, 18 Juni 2020

Sejak awal tahun 2020 pemerintah melalui Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menerapkan proses pertemuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai sisi permintaan perumahan dengan bank pelaksana penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pengembang perumahan sebagai penyedia hunian secara sistematis melalui aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep).

PPDPP terus mengedepankan teknologi informasi dengan rangkaian sistem untuk memenuhi layanan kebutuhan hunian bagi MBR. Secara sistematis, rangkaian sistem yang dibangun oleh PPDPP tersebut memiliki empat pintu dalam pelaksanaannya. Pintu pertama, yang bisa diakses langsung oleh MBR melalui aplikasi SiKasep, pintu kedua adalah pengembang yang menginput data huniannya melalui **Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang)** yang bertugas untuk menyiapkan semua data perumahan yang akan dipilih oleh MBR, pintu ketiga adalah diperuntukkan bagi perbankan yang melakukan verifikasi dengan *sistem host to host*. Sedangkan pintu keempat adalah PPDPP yang memproses pengajuan data MBR, menyalurkan dana FLPP, dan memonitoring pelaksanaannya.

Dalam rangka menyediakan informasi kesediaan hunian secara terkini, data yang terekam pada aplikasi SiKumbang menunjukkan progres yang terus meningkat. Tercatat dalam database PPDPP per 18 Juni 2020 pukul 14.20 WIB, jumlah lokasi yang terdaftar pada aplikasi SiKumbang telah mencapai 10.408 lokasi, dengan lokasi yang lolos pengecekan sebanyak 3.273 lokasi dan 1.367 lokasi masih menunggu pengecekan. Sebanyak 9.547 lokasi data terintegrasi dengan SiKasep (bisa akad) dan 12.193 pilihan rumah yang tersedia. Sedangkan data yang perlu dilakukan revisi oleh pengembang adalah sebanyak 4.908 lokasi.

Adapun hal-hal yang menyebabkan proses pendaftaran tersebut perlu direvisi lagi akibat *siteplan* latar tidak sesuai; pengesahan *siteplan* tidak sesuai; tanggal terbit IMB (Izin Mendirikan Bangunan) tidak sesuai; nomor IMB tidak sesuai; dan pengesahan IMB tidak sesuai.

Untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan pengembang dalam menginput data rumah dan kavling perumahan di SiKumbang, PPDPP aktif melakukan pelatihan dalam penginputan data. Setelah melakukan evaluasi awal juni lalu, mulai dari Kamis (18/6) hingga pertengahan Juli mendatang, PPDPP mengadakan pelatihan untuk memasukkan data ke *siteplan* latar SiKumbang yang diikuti oleh 18 Asosiasi Pengembang, yaitu REI, Himpera, Apersi, Perum Perumnas, Apernas, Pengembang Indonesia, Apernas Jaya, Asprumnas, Perwiranusa, Asperi, Apersi Bersatu, Apperindo, PIN, Asprin, Deprindo, Apeppi, Parsindo dan Perpesma.

Data Dalam Satu Genggaman

Dalam sistem SiKumbang, PPDPP secara *real time* mampu menyajikan data hunian kepada masyarakat berupa peta hunian yang tersedia, sedang dibangun, dan sudah terjual yang disajikan dalam berbagai warna. Warna kuning memperlihatkan perumahan yang masih tersedia, warna hitam untuk perumahan komersil dan warna merah untuk kavling perumahan yang telah terjual. Sehingga dipastikan masyarakat yang mengakses aplikasi SiKasep tidak akan kesulitan dalam memilih rumah idamannya.

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin sampaikan inovasi yang dikembangkan tersebut merupakan salah satu percepatan kesediaan hunian dalam mempertemukan *supply* dan *demand* “Kita fokus pada berapa besarnya *supply* hunian, hingga saat ini potensi dan dukungan aktif para asosiasi pengembang sangat luar biasa dalam memberikan data. Saya apresiasi pengembang yang mendaftarkan terus perumahannya ke Sikumbang. Sehari rata-rata lebih dari seribu hunian didaftarkan di aplikasi ini.”. terangnya.

Arief Sabaruddin mengakui bahwa data pemetaan tersebut sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut oleh PPDPP ke dalam berbagai hal ke depannya. Data tersebut dapat sebagai informasi prioritas bagi pemerintah untuk memenuhi

kebutuhan listrik, air bersih, dan bantuan prasarana sarana umum lainnya seperti bentuk dan ukuran agunan yang akan dibiayai oleh program rumah subsidi.

Data tersebut juga dapat disinergikan dengan manajemen kuota di bank pelaksana. Melalui rangkaian sistem ini, pemerintah dapat merancang manajemen kuota bantuan pembiayaan perumahan hingga tingkat kecamatan. Sehingga dapat secara akurat menghitung perencanaan anggaran program rumah subsidi dari tingkat nasional hingga tingkat daerah kecil sekalipun “Dengan data ini, maka bank pelaksana diharapkan tidak serta merta menjual rumah subsidi, harus didasarkan data akurat” imbuh Arief.

Di sisi para pengembang, sistem ini juga menjadi benefit tersendiri sebagai media promosi untuk memasarkan huniannya secara efektif dan efisien, Keberadaan pemetaan hunian dari para pengembang ini juga dapat sebagai masukkan kepada pemerintah daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur pendukung lokasi rumah subsidi.

Lebih lanjut Arief Sabaruddin menekankan bahwa perencanaan pembangunan rumah subsidi pada akhirnya dapat didasarkan pada permintaan masyarakat “Melalui data tersebut, berarti membangun rumah harus sesuai permintaan. Pemerintah sangat memperhatikan sisi permintaan, inilah yang dinamakan MBR sebagai subyek penyaluran bantuan pembiayaan perumahan”.

Dengan mengetahui lokasi yang diinginkan oleh masyarakat melalui SiKasep, maka para pengembang juga dapat mengetahui referensi dalam membangun huniannya secara efisien, menghindari rumah kosong yang tidak diminati oleh masyarakat.

Saat ini melalui *Management Control* yang dikelolanya, PPDPP mencatat per 18 Juni 2020 pukul 15.10 WIB sebanyak 174.210 masyarakat terdaftar sebagai *user* calon debitur pada SiKasep dengan 142.897 user telah lolos subsidi *checking* dan sebanyak 67.982 masyarakat telah menerima FLPP.

Pemerintah melalui PPDPP pada tahun 2020 menempatkan anggaran penyaluran FLPP sebesar 11 triliun yang terdiri dari Rp9 Triliun DIPA 2020 dan Rp2 Triliun dari pengembalian pokok, untuk 102.500 unit rumah. Tercatat per 18 Juni 2020

penyaluran FLPP tahun 2020 ini telah mencapai Rp6,87 triliun untuk 67.982 unit rumah, atau telah mencapai 66,32%. Sehingga total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga per 12 Juni 2020 mencapai Rp51,24 triliun untuk 723.584 unit rumah.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Humas PPDPP
Jl. Palatehan I No. 27, Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp. 021 – 27510964.
Website: www.ppdpp.id.
Hotline : 0 – 800 – 10 - 77377 (bebas pulsa)
Email : hotline.ppdpp@gmail.com

